

**DIY Pertahankan 104.905 Ha Lahan Pertanian**

# Petani Harus Diberi Insentif Khusus

**YOGYA (KR)** - Lahan-lahan pertanian di DIY semakin tergerus oleh aktivitas ekonomi manusia terutama untuk pemukiman, pembangunan infrastruktur ataupun industri. Hal itu menyebabkan kemampuan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk semakin berkurang.

Untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, Perda DIY No 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039 telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (KP2B) seluas 104.905,76 hektare (ha). KP2B itu terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 72.409,79 ha sebagai lahan inti, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 32.495,97 ha.

"Sesuai amanat Perda RTRW maka luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus dipertahankan di DIY seluas 104.905,76 Ha," kata Plt Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan DIY Syam Arjayanti di DPRD DIY, Selasa (8/9).

**\* Bersambung hal 8 kol 1**



**SUBSIDI UPAH PEKERJA:** Sejumlah pekerja membungkus teh di salah satu pabrik teh di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (9/9). Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian akan memperpanjang Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta hingga awal 2021.

KR-Antara/Okly Lukmansyah

## Kesejahteraan Petani Jadi Kunci

**YOGYA (KR)** - Laju alih fungsi lahan sawah di DIY mencapai 0,4% atau rata-rata 237,14 hektare (ha) pertahun. Kondisi itu berdampak pada makin banyaknya petani yang keluar dari sektor pertanian, sehingga mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan DIY. Kesejahteraan petani menjadi faktor kunci untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan di DIY.

Hal itu terungkap dalam diskusi Editorial KR yang tayang di kanal YouTube Kedaulatan Rakyat TV, Rabu (9/9). Diskusi menghadirkan pembicara Guru

Besar Ekonomi Pertanian dan Agribisnis UGM, Prof Dr Ir Dwijono Hadi Darmanto, dipandu oleh Redpel KR Primaswolo Sujono.

"Sensus pertanian oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, lebih dari 18 persen petani secara nasional keluar dari sektor pertanian, alias berhenti bertani. Selain berdampak pada berkurangnya petani, alih fungsi lahan mengancam ketahanan pangan, karena 80% petani kita bekerja di bidang pertanian pangan," ungkap Dwijono.

**\* Bersambung hal 8 kol 1**

## RELAKSASI IURAN BP JAMSOSTEK

# Berupa Keringanan dan Penundaan Pembayaran

**JAKARTA (KR)** - Pemerintah resmi mulai melakukan sosialisasi relaksasi dalam bentuk keringanan dan penundaan pembayaran iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek) yang akan mulai berlaku selama Agustus 2020 sampai Januari 2021.

"Alhamdulillah pada hari ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenaga-

kerjaan selama bencana nonalam penyebaran Covid-19 dapat kita mulai sosialisasikan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (9/9).

PP No 49 Tahun 2020 itu sebelumnya telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (31/8) pekan lalu untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dan perusahaan saat pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian.

Menaker meminta kepada jajaran

di BP Jamsostek untuk berkoordinasi mensosialisasikan peraturan itu kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk pekerja dan pemberi kerja.

"Saya berharap dengan pemberlakuan PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan, meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran," tegas Ida.

**\* Bersambung hal 8 kol 1**

**Analisis KR**  
**Pergub Covid-19**  
Prof Dr Saratri Wilonoyudho

**HARIAN Kedaulatan Rakyat** (3/9) lalu dalam headline menulis tentang kegemasan Pemda DIY atas ketidakpatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga diperlukan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum untuk memaksa masyarakat menaati peraturan protokol kesehatan dan memberi sanksi jika tidak mematuinya.

Perlunya Pergub ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari turunnya Instruksi Presiden RI No 6 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dengan Pergub diharapkan Gubernur dapat memberi sanksi dan berbagai kebijakan

**\* Bersambung hal 8 kol 1**

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:39	14:55	17:39	18:48	04:20

Kamis, 10 September 2020  
Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

**SUMBANGAN DOMPET KR "COVID-19"**  
**REKENING BCA**  
**NO. : 126.556.5656**  
**A/n : BP KEDAULATAN RAKYAT PT**  
NB : SEBAGAI BUKTI MOHON STRUK TRANSFER DI KIRIM KE NO.WA : 081.2296.0972

**DOMPET 'KR'**  
Bersama Kita Melawan Virus Korona  
Migunani Tumraping Liyan

**MARI** kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ini para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA **126.556.5656** atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA **081 2296 0972**.)

Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

NO	NAMA	ALAMAT	RUPIAH
617	K.W.S	Condong catur	500,000.00
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 500,000.00</b>
<b>Melalui Transfer</b>			
618	Hamba Allah		1,000,000.00
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 1,000,000.00</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 1,500,000.00</b>
s/d 08 September 2020			Rp 338,300,000.00
s/d 09 September 2020			Rp 339,800,000.00

(Tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)  
**Siapa menyusul?**

## PRESIDEN: JURNALIS SEJATI YANG KRITIS Tokoh Pers Jakob Oetama Meninggal

**JAKARTA (KR)** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan duka cita atas meninggalnya tokoh pers nasional yang juga pendiri Kompas Gramedia Jakob Oetama. Ucapan duka disampaikan Jokowi via akun Twitter resmi, Rabu (9/9).

"Turut berduka cita atas kepergian Bapak Jakob Oetama, tokoh pers, pendiri dan pemimpin Harian Kompas, di usia 88 tahun. Almarhum seorang jurnalis sejati, punya daya kritis tinggi, yang disampaikan dengan bahasa halus dan santun. Selamat jalan Bapak Jakob Oetama," tulis Jokowi.

Rencana jenazah akan dimakamkan Kamis (10/9) di Taman Makam Pahlawan. Jakob Oetama, dipastikan negatif virus Korona (Covid-19).

"Kami dua kali melakukan pemeriksaan PCR, swab Covid, dan hasilnya negatif," ujar Dokter Spesialis Penyakit Dalam RS Mitra Kelapa Gading Felix Prabowo Salim.



**Jakob Oetama**  
KR-Antara

Felix menuturkan, Jakob dalam kondisi kritis saat pertama kali masuk rumah sakit dua pekan lalu. Saat itu, Jakob mengalami gangguan multiorgan yang disebabkan komorbid atau penyakit bawaan dan usia yang sudah lanjut.

"Pada saat masuk, Bapak Jakob kondisinya kritis, ada gangguan multiorgan," ucap Felix.

Dr Achiel Suyanto SH, pengacara yang pernah banyak berhubungan dengan tokoh pers pernah kuliah di Yogyakarta tersebut, mengatakan Jakob Oetama banyak jasanya dengan diundangkan UU Keistimewaan. Dr Achiel yang saat itu sebagai tim asistensi lahirnya UUK, tahun 2011/2012, mengatakan kegiatan waktu itu banyak di Jakarta, Jakob Oetama banyak membantu, misalnya menyediakan tempat untuk diskusi dan memberikan pemikirannya. "Pak Jakob Oetama sangat serius membela Yogya," katanya tadi malam. **(Ati/Imd)-d**

## LANGGAR PROTOKOL DI PILKADA Bandel, Didiskualifikasi

**JAKARTA (KR)** - Pemerintah dan DPR memastikan, pelanggaran protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020, mendapat konsekuensi serius. Pelanggar yang telah mendapat peringatan, tak tertutup kemungkinan terkena sanksi berat yakni didiskualifikasi dari kontestasi.

Adalah Komisi II DPR yang secara serius mengkaji jenis-jenis sanksi yang akan diberikan kepada peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, Rabu (9/9) mengatakan, pihaknya tidak ingin Pilkada menjadi klaster baru penyebaran virus Korona (Covid-19).

"Kemendagri sudah banyak memberikan peringatan tertulis. Kita mulai dari peringatan tertulis, peringatan keras, bahkan mungkin kalau perlu kalau dia susah diberikan peringatan dan tidak kunjung mematuhi protokol kesehatan, bisa dilakukan diskualifikasi karena itu terkait PKPU," kata Saan Mustopa di gedung DPR Jakarta.

Ia meminta Mendagri Tito Karnavian mengantisipasi sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan diberikan sebelum calon kepala daerah itu terpilih. Hal ini merespons opsi yang akan diambil Kemendagri untuk menunda pelantikan 3 hingga 6 bulan bagi kepala daerah pelanggaran protokol kesehatan saat Pilkada.

"Kalaupun mau ya diberikan sanksi sebelum mereka terpilih. Mendagri harus mengantisipasi sebelum mereka terpilih itu harus sudah diperingatkan," tegasnya. **(Edi/Ful)-f**

## PEMBELI TERPAPAR COVID-19 BERTAMBAH

# 10 Anggota Keluarga Penjual Soto Lamongan Sembuh

**YOGYA (KR)** - Sepuluh anggota keluarga penjual Soto Lamongan di depan XT Square yang sebelumnya terpapar Covid-19 akhirnya dinyatakan sembuh. Seluruhnya merupakan orang tanpa gejala (OTG) yang selesai menjalani isolasi mandiri serta tidak ditemukan gejala setelahnya.

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, menjelaskan pihaknya juga masih menunggu dua anggota keluarga yang hasil uji swabnya belum keluar. "Selain itu kita juga menunggu lima orang anggota keluarga lain yang belum sembuh. Sekarang fokus kita terhadap klaster ini ialah paparan dari pembeli," jelasnya, Rabu (9/9).

Pembeli Soto Lamongan

yang terpapar Covid-19 per hari kemarin juga bertambah dua orang. Sehingga total pembeli yang terpapar mencapai delapan orang. Masing-masing tiga orang dari Bantul, satu orang dari Magelang dan empat orang dari Kota Yogya.

Sebagian besar pembeli yang terkonfirmasi positif Covid-19 ialah makan di tempat. Namun ada satu orang yang makanannya dibawa pulang namun hasil uji swabnya justru positif. Hal itu menjadi perhatian tersendiri terkait riwayat penularannya.

Sementara itu, terkait

hasil tracing di KUA Danurejan, pada Selasa (8/9) lalu terdapat satu tambahan konfirmasi positif yakni suami dari staf pegawai di sana. Sehingga sementara total pengembangan di KUA Danurejan mencapai enam orang, dan masih menunggu

hasil swab dua orang. **(Dhi/Ira)-d**



● **JULI** lalu, adik saya dari Kulonprogo berkunjung di rumah saya di Yogyakarta. Ketika pulang, ia berhenti membeli rokok di Sedayu. Ada seorang wanita minta membongceng motor adik saya sampai Sentolo. Di tengah perjalanan, wanita itu memukul-mukul punggung adik saya sambil berseru, "Angler... angler!" Adik saya baru tersadar kalau yang diboncengkan itu wanita tidak waras. (Drs Subagya, Jalan Kaloka 7 Bugisan Patangpuluhan, Wirobrajan Yogyakarta) -d

**Jaga Kesehatan Diri dan Orang Lain dengan Selalu Memakai Masker**

**BANK BPD DIY**  
Transaksi Cepat & Aman hanya dalam satu genggamannya  
Bank BPD DIY Mobile  
#SemuaJadiMudah

**Data Kasus Covid-19** **Rabu, 9 September 2020**

1. Nasional:	2. DIY:
- Pasien positif : 203.342 (+3.307)	- Pasien positif : 1.645 (+50)
- Pasien sembuh : 145.200 (+2.242)	- Pasien sembuh : 1.268 (+52)
- Pasien meninggal : 8.336 (+106)	- Meninggal confirm : 48 (+1)

Sumber: Posko Terpadu Penanganan Covid-19 Pemda DIY dan Nasional. (KR-Ria/Ira/grafis JOS)